PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **YUDIKATIF**

LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG**

UNIT KERJA : **PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I WAYAN SUPARTA**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **712905**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.845.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/99 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
2. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **198.500.000**

1. MOTOR, HONDA SCOPY C1C02N16M2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT X1B02N04LOA/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOBIL, HONDA FREED GB31.5 E AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **72.150.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **73.701.452**

F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.189.351.452
III.	HUTANG	Rp.	471.140.896
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.718.210.556

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.